

**BAB IV**

**FAKTOR EKSTERNAL YANG MELATARBELAKANGI KEBIJAKAN  
KOREA SELATAN ATAS PENUTUPAN AKTIVITAS DI INDUSTRI  
KAESONG**

Penutupan Kaesong pada tahun 2016 merupakan sebuah berita yang mengejutkan bagi berbagai pihak. Mengingat kaesong merupakan keberhasilan upaya Korea Selatan dalam membuka kerjasama dengan Korea Utara.

Dalam bab ini, penulis mengacu pada factor eksternal dari Korea Selatan yang mempengaruhi pengambilan keputusan politik luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara. Penulis akan menjelaskan lebih lanjut tentang faktor eksternal yang mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh Korea Selatan terhadap tindakan provokatif Korea Utara pada tahun 2016 dibawah pemerintahan Park Geun Hye.

**A. Pelanggaran Korea Utara atas Sanksi PBB**

Dalam lingkup keamanan global, sejak awal abad 21 dengan adanya kemajuan yang pesat dalam inovasi teknologi negara-negara di dunia mulai saling membuka dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang bisa saling memberikan kepercayaan dan keuntungan bagi negaranya. Meskipun pada saat yang bersamaan, sejalan dengan perkembangan kerjasama negara tersebut akan muncul resiko-resiko yang juga ikut berkembang dan bahkan akan membawa dampak kerusakan hingga ancaman keamanan. Masalah keamanan yang sering

kali muncul membuat beberapa pihak merasa perlu memperkuat militernya untuk berjaga-jaga dari adanya serangan dan ancaman dari negara lain.

Maret 2013 Ketegangan di Semenanjung Korea kian meningkat setelah Korea Utara menyatakan "dalam kondisi perang" dengan Korea Selatan. Perselisihan dan konfrontasi yang sudah berlangsung bertahun-tahun tersebut akhirnya kembali mencuat dan banyak mendapat perhatian publik. Awal mula pemicunya adalah adanya kompetisi militer diantara kedua negara. Korea Utara sendiri sering melakukan ujicoba rudal yang dikecam oleh banyak Negara termasuk oleh Negara maju seperti Amerika. Kekuatan nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara memang sudah sejak dulu dikecam oleh negara lain, karena nuklir sendiri dianggap sebagai senjata yang dapat mengancam keamanan suatu Negara.

Program nuklir Korea Utara awalnya dimulai pada akhir tahun 1950-an, dan Korut memulai proyek pengembangan nuklir pertama kali pada tahun 1986. Saat itu Korut memulai pengoperasian reaktor nuklir lima megawatt di Yongbyon setelah selama tujuh tahun melakukan konstruksi dengan bantuan Uni Soviet.<sup>1</sup> Program nuklir ini menggunakan tenaga kerja dari warga negaranya dan menggunakan pasokan teknologi dari luar negeri untuk membangun reaktor nuklir kecil berukuran 5 MWE di Yongbyon. Saat itu Korea Utara telah mampu memproduksi 6kg plutonium pertahun.<sup>2</sup> Setahun

---

<sup>1</sup> international.sindonews.com. "Sejarah Nuklir Korut, Dari Pembangkit Listrik Menjadi Senjata" diakses pada tanggal 5 Maret 2017. Melalui laman <https://international.sindonews.com/read/1138254/41/sejarah-nuklir-korut-dari-pembangkit-listrik-menjadi-senjata-1473474477>

<sup>2</sup> Hakim, Amri. Op.cit. Halaman 7

berikutnya satelit Amerika Serikat mendeteksi adanya uji coba ledakan dan rencana baru untuk memisahkan plutonium dari reaktor.

Melihat adanya ancaman nuklir dari pihak Korea Utara, gabungan dari 6 negara besar kemudian berkumpul dan membentuk *six party talks* untuk merundingkan nasib nuklir milik Korea Utara. Pada tahun 1993, Korut mengancam akan mundur dari perjanjian proliferasi nuklir, tetapi kemudian menundanya. Selang setahun kemudian, Korut dan Amerika Serikat (AS) menandatangani perjanjian di mana Pyongyang menutup reaktor nuklir berbasis plutonium Yongbyong dengan imbalan bantuan pembangunan dua reaktor nuklir untuk menghasilkan listrik. Pada Januari 2003, Korea Utara menarik diri dari perjanjian nonproliferasi nuklir. Pada bulan Agustus Korut bergabung dalam putaran pertama perundingan nuklir enam negara di Beijing, yang meliputi China, Jepang, Rusia, Korea Selatan (Korsel) dan AS. Selang dua tahun kemudian atau 2005, Korut mengumumkan telah memiliki senjata nuklir dan selang satu tahun kemudian atau 2006, negara komunis itu melakukan uji coba nuklir bawah tanah.

Pada tingkat geopolitik, Kaesong sendiri merupakan salah satu bagian dari kebuntuan antara DPRK dan Amerika Serikat, China, Korea Selatan, Jepang, dan Rusia, atas program senjata nuklir Korea Utara, dan pada tahun 2008 perundingan enam pihak dibatalkan, dan Korea Utara mengeporasikan kembali reaktor 5MWE dan secara terbuka mengumumkan pengayaan uranium untuk kepentingan militer dan pembangunan reaktor light water yang diperkirakan membuat Korea Utara mampu memproduksi plutonium yang

telah dipisahkan sebanyak 30 sampai 50kg sehingga cukup untuk setengah lusin senjata nuklir.<sup>3</sup> Perkembangan nuklir Korea Utara masih terus berlanjut hingga tahun 2009 Korea Utara menyatakan bahwa tahun itu merupakan kali kedua Korea Utara telah berhasil mengadakan uji coba bom atom. Dengan adanya uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara, komunitas internasional terus berupaya untuk mencegah kelanjutan program nuklir Korea Utara. April 2012 Korea Utara mengubah konstitusinya. Sejak itu, negara tersebut menyebut diri secara resmi sebagai bangsa bersenjata nuklir.<sup>4</sup> Korea Utara memang erat kaitannya dengan kekuatan nuklir yang dimilikinya. Sehingga isu nuklir yang dimiliki Korea Utara ini merupakan kasus yang serius bagi keamanan negara tetangganya, Korea Selatan. Hingga isu tersebut berkembang dan mempengaruhi hubungan yang ada di Semenanjung Korea semakin memanas. Puncak hubungan damai di semenanjung Korea terjadi pada tahun 2013, dimana uji coba nuklir ketiga oleh Korea Utara dilakukan yang secara langsung melanggar Resolusi PBB 1718 tahun 2006, 1874 tahun 2009, dan Resolusi 2078 2013 yang sebelumnya sudah diberikan sebagai peringatan nuklir untuk Korea Utara.

Dengan adanya uji coba nuklir ketiga oleh Korea Utara, hal ini membuat pihak Korea Selatan maupun dunia Internasional harus berupaya tegas terhadap Pyongyang, Dengan uji coba tersebut, DK PBB dengan tegas mengeluarkan sanksi dalam Resolusi 2094 pada tanggal 7 Maret 2013 dengan

---

<sup>3</sup> Hakim, Amri. Op.cit. Halaman 8

<sup>4</sup> www.dw.com, “Korea Utara: Miskin, Berbahaya dan Punya Senjata Nuklir” Diakses pada tanggal 16 Maret 2017. Diakses melalui laman <http://www.dw.com/id/korea-utara-miskin-berbahaya-dan-punya-senjata-nuklir/a-16595936>

tujuan untuk mencegah penyebaran Senjata Pemusnah Masal dan teknologi misil balistik.<sup>5</sup> Sanksi dari PBB ini berisikan sanksi yang diberlakukan untuk Korea Utara atas sikap Korea Utara yang kembali menggunakan senjata nuklirnya sebagai senjata pemusnah masal yang dilarang digunakan karena mengancam keamanan negara lain. Dalam draft ini, PBB menegaskan kembali bahwa proliferasi senjata nuklir, kimia dan biologi, serta cara penyampaiannya, merupakan ancaman bagi perdamaian internasional dan keamanan. Hal ini juga menggarisbawahi respon DPRK dalam menanggapi masalah keamanan dan kemanusiaan lainnya dari masyarakat internasional.<sup>6</sup>

Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 2094 sebagai sebuah rasa prihatin bahwa DPRK menyalahgunakan hak istimewa dan kekebalan yang diberikan berdasarkan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik dan Konsuler. DK PBB juga mengungkapkan keprihatinan paling berat bahwa kegiatan rudal nuklir dan balistik yang dilakukan oleh DPRK telah semakin meningkatkan ketegangan di wilayah ini dan di luarnya, dan menentukan bahwa masih ada ancaman nyata bagi perdamaian dan keamanan internasional. Dari tindakan Korea Utara pada tahun 2013, maka Dewan Keamanan PBB membuat tindakan yang berdasarkan Bab VII dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan mengambil tindakan berdasarkan Pasal 41. **(Terlampir)**

---

<sup>5</sup> Hakim, Amri. Op.cit. Halaman 9

<sup>6</sup> United Nations Security Council, “Resolution 2094 (2013)” diakses pada 21 Mei 2017. Melalui laman <https://www.un.org/sc/suborg/en/s/res/2094-%282013%29>

Resolusi DK PBB juga didukung oleh negara-negara lain yang menginginkan Korea Utara untuk melepaskan semua rencana tentang riset dan pembuatan senjata nuklir serta sistem rudal militer, dan dapat kembali ke Persetujuan Non-proliferasi Senjata Nuklir dan mekanisme terkait Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), serta bergabung dengan Persetujuan Pencegahan ujicoba nuklir secara menyeluruh untuk memelihara perdamaian dan kestabilan di Semenanjung dan kawasan Asia Timur Laut sesuai dengan kepentingan bersama masyarakat internasional.<sup>7</sup>

Namun, dengan adanya resolusi DK PBB hal ini tidak membuat Korea Utara menghentikan tindakannya. Hampir setiap tahun Korea Utara selalu melakukan tindakan provokatif di wilayah Asia Timur. Tindakan uji coba yang dilakukan oleh Korea Utara sejak pada masa jabatan Park Geun Hye diawal 2013 hingga Februari 2016 akan dilampirkan dalam tabel dibawah ini:

---

<sup>7</sup> [indonesian.cri.cn](http://indonesian.cri.cn), "PBB Ratifikasi Resolusi Masalah Nuklir Korut" diakses pada 6 Mei 2017. Melalui laman <http://indonesian.cri.cn/201/2013/03/08/1s136265.htm>

Tabel 4. 1 Tindakan Provokatif Uji Coba Nuklir Korea Utara

No	Tanggal	Keterangan
1	Februari 2013	Korea Utara melaksanakan uji-coba nuklir ke-3
2	Maret 2013	Dua rudal tipe KN diluncurkan ke perairan Laut Timur
3	April 2013	Korea Utara menyatakan akan kembali mengoperasikan reaktor nuklir berkapasitas 5MW di Yongbyeon
4	Mei 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Satu artileri 300 mm ditembakkan ke perairan Laut Timur</li> <li>- Sebanyak 6 artileri 300 mm ditembakkan ke perairan Laut Timur</li> </ul>
5	Maret 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebanyak 4 artileri 300 mm dan 3 artileri 240 mm ditembakkan ke perairan Laut Timur</li> </ul>
6	Juni 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiga artileri 300 mm ditembakkan ke perairan Laut Timur</li> </ul>
7	Juli 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Empat artileri 300 mm ditembakkan ke perairan Laut Timur</li> <li>- Penembakan seratus artileri 240 mm, 122 mm dan peluru artileri ke perairan Laut Timur</li> </ul>
8	Agustus 2014	Penembakan 5 artileri 300 mm ke perairan Laut Timur
9	Februari 2015	Peluncuran 5 rudal jarak pendek tipe baru ke perairan Laut Timur
10	Maret 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebanyak 7 rudal darat ke udara tipe SA diluncurkan ke perairan Laut Timur</li> <li>- Dua rudal Scud diluncurkan ke perairan Laut Timur</li> </ul>
11	Agustus 2015	Korea Utara melakukan provokasi tembakan ke Yeongcheon, provinsi Gyeonggi, Korea Selatan
12	Januari 2016	Korea Utara melakukan uji coba nuklir ke-4. Televisi Pemerintah Korea Utara mengklaim uji bom nuklir pertama berjalan secara sukses
13	Februari 2016	Roket jarak jauh Gwangmyeongseong-4 diluncurkan di Tongchang-ri, provinsi Pyongan Utara

Sumber: *World.kbs.co.kr*, "Catatan tentang nuklir dan rudal Korea Utara" diakses pada 25 Maret 2017. Melalui laman [http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/history/nucleus\\_history.htm?lang=i](http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/history/nucleus_history.htm?lang=i)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama masa jabatan Park Geun Hye, Korea Utara terus melakukan tindakan provokatif yang mengancam keamanan, serta membuat ketidakstabilan di semenanjung Korea. Tindakan yang dilakukan oleh Korea Utara ini membuat Korea Utara banyak mendapat kekangan dari dunia luar. Dunia internasional menilai tindakan yang dilakukan oleh Korea Utara tersebut membawa berbagai dampak ancaman di semenanjung Korea, Asia Timur, maupun dunia internasional.

Setelah adanya draft resolusi 2094, Korut tidak berhenti atas tindakan provokatifnya. Hingga Februari 2016 Korut terus melakukan uji coba nuklir dan tindakan provokatifnya terhadap dunia luar dan juga Korea Selatan. Pelanggaran draft resolusi ini dilakukan oleh pihak Korea Utara dengan membuat pernyataan pada April 2013 bahwa pihaknya akan tetap mengoperasikan reaktor nuklir berkapasitas 5MW di Yongbyeon. Dan pada januari 2016, Korea Utara mengklaim keberhasilan uji coba bom hidrogen kepada dunia luar. Dengan adanya uji coba bom hidrogen tersebut, Korea Utara telah menunjukkan bahwa negaranya masih terus melakukan program nuklir dengan tidak melihat adanya sanksi yang sebelumnya sudah diberikan oleh masyarakat internasional.

Korea Selatan melihat potensi ini sebagai ancaman, dengan Korea Utara yang masih terus melanggar sanksi draf resolusi dari PBB, hal ini membawa bukti bahwa adanya pengembangan nuklir dibawah kepemimpinan Kim Jong-Un. Korea Selatan yang mana hal tersebut merupakan bukti jelas dari adanya pelanggaran.

Sebagai tindak lanjut, negeri ginseng segera melakukan koordinasi dengan masyarakat internasional, termasuk sekutu-sekutunya yang tergabung dalam Six-Party Talks. Dalam mengambil tindakan tegasnya, Korea Selatan mengatakan bahwa negaranya akan mengambil semua langkah yang diperlukan, termasuk berupaya menambah sanksi dari Dewan Keamanan PBB untuk memberikan konsekuensi yang wajar dan sepadan dengan uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. Korea Selatan pun menegaskan tetap menerapkan kesiagaan yang tinggi untuk menghadapi provokasi lebih lanjut dari Korea Utara yang bisa mengancam keselamatan rakyat Korea Selatan.

Dengan tindakan yang dilakukan Korea Utara, Korea Selatan memutuskan untuk memberlakukan sanksi yang lebih tegas terhadap Korea Utara dengan memutuskan hubungan kerjasama industri mereka yang sudah membawa banyak keuntungan bagi Korea Utara sebagai respon tegas dan sebagai upaya untuk menghentikan program pengembangan nuklir Korea Utara.

## **B. Faktor Keamanan**

Faktor keamanan merupakan bagian dari kepentingan suatu negara yang menjadi alasan untuk mengambil langkah kebijakan negara tersebut. Dalam kasus KIC, Korea Selatan memiliki faktor keamanan yang membuat negara Korea Selatan harus membuat kebijakan baru untuk melindungi negaranya dari ancaman keamanan yang ada.

Pemerintahan Korea Selatan pada masa Park Geun Hye menetapkan suatu kebijakan baru yang mengacu pada kepercayaan. Kebijakan Park Geun

Hye tersebut adalah kebijakan "*Trust-building process*" di Semenanjung Korea yang didukung oleh adanya komitmen yang kuat untuk keamanan, dan dengan memiliki tujuan untuk membangun kepercayaan dalam hubungan antar kedua Korea. Prioritas utama dari adanya "*trustpolitik*" adalah untuk membangun adanya kepercayaan di Semenanjung Korea, dengan memastikan siklus yang baik yang akan meningkatkan hubungan Korea Selatan dengan Korea Utara, menjaga perdamaian di wilayah tersebut, dan membuat dasar untuk unifikasi Korea.

*Trust Building Process* di tujukan untuk mengakhiri siklus ketegangan yang sering melanda hubungan di Semenanjung Korea. Banyaknya tindakan provokasi, dan krisis menyebabkan ketidakstabilan dan konfrontasi di Semenanjung Korea. Dan dengan kebijakan *Trust Building Process* memberikan harapan baru bagi semenanjung Korea untuk mengakhiri krisis serta permasalahan yang ada, selain itu kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong Korea Utara untuk menjadi anggota yang bertanggung jawab dari masyarakat internasional. Karena tanpa adanya kepercayaan diantara kedua Korea serta diantara Korea Utara dan masyarakat internasional, tidak akan ada sebuah solusi untuk masalah nuklir. Dengan pemikiran ini, pemerintah Korea Selatan telah menetapkan untuk mengatasi akar penyebab pengembangan nuklir Korea Utara dengan membangun sebuah program kepercayaan tanpa meninggalkan bentuk pendekatan dari masa lalu. Upaya ini merupakan cara untuk untuk memaksimalkan kekuatan potensi masing-masing. Menurut data

dari Ministry of Reunification *Trust Building Process* memiliki 3 tujuan umum yaitu:<sup>8</sup>

1. *Pertama*, kebijakan yang mengupayakan proses membangun sebuah kepercayaan di semenanjung bertujuan untuk mendorong pengembangan hubungan antar-Korea. Point ini menjelaskan bahwa pemerintah Korea Selatan membuka bab baru hubungan antar-Korea berdasarkan akal sehat dan sesuai dengan norma-norma dan standar internasional, sementara pada saat yang sama Semenanjung Korea berusaha untuk memperluas dasar kepentingan bersama melalui kerja sama yang saling memberikan keuntungan. Upaya ini akan mendukung tujuan unifikasi untuk membangun kembali kehidupan bersama antar-Korea dalam hal ekonomi, sosial dan budaya.
2. *Kedua*, proses *trust-building* yang berupaya untuk membangun perdamaian abadi di semenanjung Korea. Perdamaian akan tetap menjadi harapan sulit untuk dicapai selama Korea Utara terus meningkatkan baik persenjataan nuklirnya dan ancaman militer yang dilakukan ke Korea Selatan. Untuk mengamankan adanya perdamaian yang abadi, pemerintah Korea Selatan akan bekerja dengan masyarakat internasional untuk perlucutan nuklir serta untuk generasi saling percaya antar-Korea di bidang politik dan militer.
3. *Ketiga*, tujuan kebijakan Korea Selatan adalah untuk meletakkan dasar untuk Unifikasi di dalam dan di luar negeri, dalam rangka memenuhi tujuan akhir dari penyatuan kembali Semenanjung Korea. Untuk tujuan ini, Korea Selatan harus terlibat dalam pembangunan kapasitas yang dibutuhkan untuk mengambil inisiatif dalam mempersiapkan unifikasi. Pemerintah Korea

---

<sup>8</sup> Ministry Of Reunification, “Unification Policy: Trust-building Process Policy” diakses pada tanggal 28 Maret 2017. Diakses melalui laman <http://eng.unikorea.go.kr/content.do?cmsid=1782>

Selatan akan melakukan upaya untuk meminta dukungan dan kerjasama seluruh dunia untuk tujuan upaya penyatuan Korea, dengan pemahaman bahwa hal ini akan menjadi *win-win solution* tidak hanya untuk kedua bagian semenanjung, tetapi juga untuk masyarakat internasional.

Selain tujuan umum, kebijakan *Trust Building-Process* juga memiliki 4 arah kebijakan untuk program nuklir Korea Utara. Arah kebijakan ini, *Pertama*, untuk mengupayakan proses membangun rasa saling percaya di Semenanjung Korea didasarkan pada dasar keamanan yang kuat. Didukung oleh pencegahan yang kuat, pemerintah Korea Selatan akan merespon tegas terhadap segala tindakan provokasi oleh Korea Utara dan akan memastikan bahwa tindakan provokasi maupun tindakan perang akan berbuntut pada konsekuensi yang harus diterima. *Kedua*, membangun rasa percaya perlu dimulai dengan menjaga suatu perjanjian. Kepatuhan terhadap perjanjian antar-Korea yang ada serta untuk mereka yang dicapai dengan masyarakat internasional sangat penting untuk mengumpulkan kepercayaan. *Ketiga*, melalui dialog dan kerjasama berdasarkan kepercayaan pemerintah Korea Selatan akan berupaya untuk mendorong Korea Utara untuk menghentikan program nuklirnya dan mematuhi norma-norma dan kewajiban internasional. *Keempat*, untuk memperkuat konsensus domestik, Korea Selatan akan mengumpulkan pendapat dari warga Korea Selatan dan meningkatkan transparansi dalam berbagi informasi dan implementasi kebijakan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

Hal ini juga akan melibatkan peran masyarakat internasional dengan tujuan untuk membuat kebijakan menjadi lebih efektif dan lebih dapat diterima untuk Utara. Arah kebijakan ini mengarah pada keputusan yang nantinya akan diambil oleh Korea Selatan. Dengan arah kebijakan ini, Korea Selatan akan lebih tegas dalam memberikan respon terhadap segala tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Korea Utara. *Trust Building Process* disepakati dengan adanya inisiatif kebijakan tersebut. Inisiatif kebijakan ini juga memiliki beberapa point. Isi inisiatif kebijakan *Trust Building Process* ada ditabel dibawah ini :

Tabel 4.2 Inisiatif Trust Building Process

<b>Inisiatif Trust Building Process</b>		
1.	Membangun kepercayaan untuk hubungan antar Korea yang normal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melanjutkan upaya untuk menangani masalah kemanusiaan</li> <li>- Membentuk saluran dialog dan memastikan penyampaian kesepakatan</li> <li>- Perluasan dan pengembangan saling tukar dan kerjasama</li> </ul>
2.	Perdamaian yang berkelanjutan di semenanjung Korea.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan sistem pertahanan yang kuat untuk menjaga perdamaian</li> <li>- Upaya untuk menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara</li> <li>- Pengembangan taman damai DMZ</li> <li>- Membangun kepercayaan politik dan militer</li> </ul>
3.	Penguatan infrastruktur untuk penyatuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkembangan formula Unifikasi Masyarakat Nasional</li> <li>- Keterlibatan publik yang aktif terhadap penyatuan nasional</li> <li>- Peningkatan kualitas hidup warga Korea Utara</li> </ul>
4.	Unifikasi damai dan Inisiatif untuk Perdamaian dan Kerjasama di Asia Timur Laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berupaya untuk memperluas dukungan internasional untuk penyatuan Korea</li> <li>- Mengejar perdamaian dan pembangunan berkelanjutan di Asia Timur Laut</li> </ul>

Sumber: IMinistry Of Reunification, "Unification Policy: Trust-building Process Policy" diakses pada tanggal 28 Maret 2017. Diakses melalui laman <http://eng.unikorea.go.kr/content.do?cmsid=1782>

Kebijakan pada masa Presiden Park ini pada intinya memiliki tujuan untuk membantu Korea Utara untuk maju dan meninggalkan perogram nuklirnya yang membawa ancaman bagi negara lain. Dalam hal ini terlihat

keseimbangan kerjasama dan kebijakan tegas akan provokasi yang nantinya mungkin akan terjadi di semenanjung Korea.

Meskipun *Trust Building Process* menjadi harapan yang besar bagi semenanjung Korea, namun pada akhirnya kebijakan ini harus berakhir karena dengan adanya provokasi oleh Korea Utara pada Januari 2016 telah melanggar adanya perjanjian kebijakan *trust building-process*.

Uji coba oleh Korea Utara kembali dilakukan pada Februari 2016. Korea Utara meluncurkan roket jarak jauh yang merupakan pengujian terhadap teknologi rudal yang dilarang. Roket tersebut diluncurkan dari markas di barat laut negara tersebut hingga melewati bagian selatan pulau okinawa, Jepang. Sebelumnya Korea Utara sudah melakukan beberapa kali uji roket, yang mereka klaim sebagai tindakan yang memiliki tujuan ilmiah. Tidak hanya tahun 2016, beberapa tindakan uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara sebelumnya selalu disamarkan sebagai sebuah satelit. Adanya rincian uji coba tersebut tidak banyak diketahui oleh negara luar, hal ini dikarenakan Korea Utara merupakan negara dengan menganut rezim yang tertutup dan mengisolasi diri dari negara luar.<sup>10</sup>

Sebulan sebelum penutupan Kaesong, Korea Utara mengklaim telah sukses melakukan tes bom hidrogen pada Januari 2016. Yang mana tes bom hidrogen ini menyebabkan gunung Paekdu meletus. Uji coba tersebut setara

---

<sup>10</sup> Sandyka Kurniawan, 2016. "Kebijakan Jepang Terhadap Uji Coba Senjata Oleh Korea Utara", *Skripsi*. FISIPOL. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Halaman 32

dengan gempa berkekuatan 5,1 SR. Hal ini tentu saja mengancam keamanan Korea Selatan sebagai negara tetangga Korea Utara.<sup>11</sup>

Dengan hal ini, Korea Utara telah merusak kepercayaan yang ada di Semenanjung Korea dengan memperlihatkan fakta bahwa Korea Utara masih menjalankan dan mengembangkan program nuklirnya, dan juga Korea Utara dalam sikap provokasinya tersebut sudah mengancam keamanan domestik Korea Selatan. Hal itu menegaskan bahwa Korea Utara telah melanggar isi dari *Trust Building Process* yang memiliki tujuan, prinsip, maupun inisiatif untuk melangsungkan hubungan yang normal tanpa adanya ancaman nuklir. Pelanggaran Korea Utara ini memang bukan untuk permakalinya dilakukan dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, Korea Selatan kemudian memberikan konsekuensi kebijakan yang tegas untuk Korea Utara.

Dalam kebijakan tercatat akan adanya konsekuensi tegas yang akan diberikan apabila terjadi ancaman nuklir dan tindakan provokasi. Langkah kebijakan yang dilakukan oleh Korea Selatan ini dengan mengumumkan bahwa Korea Selatan melakukan tindakan tegas untuk menutup Industri Kaesong yang selama lebih dari satu dekade menjadi simbol kerjasama damai di Semenanjung Korea. Sesuai arah kebijakannya, Korea Selatan berupaya untuk melakukan tindakan yang akan membuat program nuklir Korea Utara berhenti. Selain itu, penutupan Kaesong ini merupakan akhir dari kerjasama di Semenanjung Korea. Adanya pelanggaran dalam upaya membangun rasa

---

<sup>11</sup> Bbc.com, "Korea Utara mengaku berhasil menguji bom hidrogen" diakses pada 19 Mei 2017. Melalui laman [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160106\\_dunia\\_gempa\\_korut](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160106_dunia_gempa_korut)

saling percaya yang sebelumnya disetujui oleh kedua negara di Semenanjung Korea, membawa kembali ketegangan hubungan kedua Korea. Provokasi yang selalu dilakukan oleh Korea Utara menjadi faktor berakhirnya kebijakan serta kerjasama yang ada, dan menjadi faktor untuk Korea Selatan dalam memberlakukan kebijakan penutupan Kawasan Industri Kaesong.

Dengan adanya provokasi ini perdamaian di semenanjung Korea hanya menjadi impian belaka. Kaesong yang diharapkan sebagai wadah penghubung kedua negara ini tidak lagi dipertahankan. Sanksi Korea Selatan ini juga merupakan upaya untuk melemahkan program Nuklir Korea Utara. Dengan pemutusan kerjasama tersebut, ketegangan kembali terjadi dalam hubungan di Semenanjung Korea.